



## **Kajian Kinerja Sistem Polder sebagai Model Pengembangan Drainase Kota Semarang Bagian Bawah dengan *Balanced Scorecard***

**Hari Nugroho**

Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275  
E-mail: harinugroho66@yahoo.co.id

**Dwi Kurniani**

Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275  
E-mail: dwik\_ani@yahoo.com

**Mega Asiska**

Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275  
E-mail: mega.asiska@gmail.com

**Nuraini**

Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275  
E-mail: nuraini121993@gmail.com

### **Abstract**

*One of the technological flood control and rob in the big cities is the polder system that include drainage systems , retention ponds, levees that surround the area, as well as the pump and / floodgates, as the area of integrated water management system. Likewise, as the coastal city of Semarang in Indonesia has built some of the polder which has been in operation or under construction. To assess the success of the polder management, necessary for a study to determine the performance of the system in controlling the flood in Semarang. Assessment of performance of the system as a whole polder in this study used the concept of the Balanced Scorecard (BSC). The results of this study demonstrate the performance of the polder in Semarang is an ideal: Polder Tanah Mas (73.81 / 100), then Polder Banger (67.21 / 100), Polder Kali Semarang (58.70/100) and the Polder Tawang (58.65/100). The performance of the Polder system above can not be separated from the existence of an independent governing body and had been prepared much earlier. So the presence of the governing body needs to be prepared in the polder system development. To improve performance, the polder-existing polder in Semarang needs to be improved its performance by improving the performance indicators is still less based on this research primarily on indicators: financial, management agencies and learning and development.*

**Keywords:** *Polder Semarang, Performance, Balanced Scorecard.*

### **Abstrak**

*Salah satu teknologi pengendalian banjir dan rob di kota-kota besar adalah dengan sistem polder, yang meliputi sistem drainase, kolam retensi, tanggul yang mengelilingi kawasan, serta pompa dan/ pintu air, sebagai kawasan pengelolaan tata air yang terpadu. Demikian juga dengan Kota Semarang beberapa polder yang telah beroperasi dan beberapa masih dalam tahap pembangunan. Untuk menilai keberhasilan*

pengelolaan polder, diperlukan adanya suatu kajian untuk mengetahui kinerja dari sistem tersebut dalam mengendalikan banjir dan rob di Kota Semarang. Penilaian kinerja dari sistem polder secara menyeluruh dalam penelitian ini digunakan konsep *Balanced Scorecard (BSC)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja polder di Kota Semarang yang ideal adalah berturut-turut: Polder Tanah Mas dengan nilai (73,81/100), Polder Banger (67,21/100), Polder Kali Semarang (58,70/100) dan Polder Tawang (58,65/100). Kinerja dari Sistem Polder diatas tidak dapat dilepaskan dari keberadaan badan pengelola yang mandiri dan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Sehingga keberadaan badan pengelola perlu dipersiapkan dalam pengembangan sistem polder. Untuk meningkatkan kinerjanya maka polder-polder yang sudah ada di Kota Semarang perlu ditingkatkan kinerjanya dengan meningkatkan kinerja: keuangan, badan pengelola, dan pembelajaran dan pengembangan.

**Kata-kata kunci:** Polder Kota Semarang, Kinerja, *Balanced scorecard*.

## Pendahuluan

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi maupun perdagangan. Selain dampak positif akan pertumbuhan yang tersebut, Kota Semarang juga mengalami persoalan lingkungan yang serius. Di wilayah Semarang bagian utara yang dekat dengan bagian pantai (*lebih dikenal dengan Semarang Bawah*), muncul berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir dan rob. Banjir dan rob telah lama menjadi persoalan yang tidak mudah diatasi, utamanya di Kecamatan Semarang Utara. Kawasan yang wilayahnya menjadi langganan rob dan banjir adalah Kelurahan Tambakmulyo, Tambakrejo, Tanjung Mas serta Bandarharjo. Banjir di kawasan tersebut rata-rata mencapai ketinggian antara 30 dan 40 cm, tetapi lokasi yang paling parah adalah Tambakmulyo dan Tambakrejo, karena memang paling dekat dengan pantai (*Bappeda Kota Semarang, 2013*).

Untuk mengatasi banjir dan rob di tempat diatas, Pemerintah telah membangun sistem polder. Sistem ini merupakan salah satu teknologi pengendalian banjir dan rob yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan banjir dan rob di kota-kota besar, yaitu suatu cara penanggulangan banjir dengan bangunan fisik yang meliputi sistem drainase, kolam retensi, tanggul yang mengelilingi kawasan, serta pompa dan/ pintu air, sebagai kawasan pengelolaan tata air yang terpadu.

Beberapa polder yang telah beroperasi seperti Polder Kali Semarang, Polder Tawang, Polder Tanah Mas maupun yang masih dalam tahap pembangunan seperti Polder Banger perlu dilakukan kajian untuk menilai kinerja dari sistem ini dalam mengendalikan banjir. Penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh terhadap unsur teknis maupun non teknis sistem polder karena besarnya peran unsur-unsur non teknis terhadap kinerja sistem polder.

## Permasalahan

Hasil kajian pada instansi terkait seperti Bappeda, PSDA, ESDM, dinas Pariwisata dan DPRD, observasi lapangan, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), secara umum dapat disarikan keberadaan kolam retensi Tawang Kota Lama dan mungkin juga berlaku untuk Polder-polder yang lain dihadapkan berbagai permasalahan yang terancam kelestariannya. Ada dua faktor penyebab permasalahan tersebut, yakni faktor struktural dan nonstruktural.

Secara struktural, terkait dengan masalah implementasi kebijakan pengelolaan kolam retensi dan dampak lingkungan yang terjadi. Intinya, kolam retensi Tawang Kota Lama belum berfungsi secara optimal untuk pengendali banjir dan rob, belum dapat melindungi kawasan cagar budaya Kota Lama dan belum dapat berfungsi sebagai objek wisata kota.

Secara nonstruktural, yakni terkait dengan tanggungjawab masyarakat di sekitar Kolam Retensi (polder) sebagai pengguna manfaat Kolam Retensi (polder) yang belum memiliki kontribusi secara nyata untuk membangun polder berkelanjutan. Hal ini dibuktikan oleh peran pemangku kepentingan dan kepedulian masyarakat terhadap Kolam Retensi (polder).

Beberapa pakar mengatakan sangat risau melihat kondisi sebagai contoh kolam retensi Tawang yang semakin tidak terawat. Karena di area kolam retensi dinilai tidak indah lagi seperti masa lalu, tidak aman, tidak nyaman dan tidak produktif. Banyak sampah bertebaran, taman tidak asri, jarang dikuras sehingga kualitas air tidak baik bahkan sering bau busuk. Jika siang dijadikan tempat berdagang sektor informal, sehingga merusak keindahan.

Pada malam hari sering digunakan sebagai area praktek prostitusi dan minum-minuman keras bahkan juga kadang menjadi ajang perkelahian.

Terhitung sudah 6 kali terjadi insiden yang menelan korban jiwa, tiga anak-anak terpeleset masuk kolam dan tiga orang dewasa karena mabuk terpelanting ke kolam. Menurut Lurah Tanjung Mas Mardiyono, tahun 2007 dijanjikan oleh pemerintah kota, bahwa kolam retensi Tawang akan diserahkan hak pengelolaan kepada masyarakat kelurahan Tanjung Mas, tetapi hingga sekarang tidak terealisasi. Namun demikian dapat disarikan bahwa kendatipun permasalahan eksternal begitu kompleks, tetapi keberadaan kolam retensi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengendalian banjir dan rob. Bagaimanapun kolam retensi tersebut mempunyai peran yang besar dalam melindungi permukiman penduduk, khususnya warga Tanjung Mas dan Purwodinatan terhadap ancaman banjir dan rob, jika terjadi hujan ekstrim bersamaan dengan terjadinya rob.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang mengakibatkan disfungsi kolam retensi (polder) sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat perlu dilakukan kajian untuk mencari alternatif solusi agar kolam retensi Tawang dapat berfungsi optimal. Atas dasar konstruksi pikir rasional, paradigma kebijakan sangat diperlukan pemikiran dan kajian kritis model pengelolaan polder berkelanjutan yang berbasis masyarakat.

Sebagai langkah awal perlu dilakukan kajian dasar untuk menilai kinerja polder yang ada di Semarang. Selanjutnya hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola berbagai hal dalam upaya peningkatan kinerjanya. Hal demikian berlaku juga bagi polder-polder lainnya yaitu Polder Kali Semarang, Polder Tanah Mas dan Polder Banger yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan.

### Penilaian kinerja

Pengelolaan suatu lembaga atau institusi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan publik dituntut untuk melaksanakan kegiatan secara professional dan memiliki kinerja yang dapat memuaskan stakeholders. Pengukuran kinerja atau yang dikenal dengan performance benchmarking diperlukan agar diketahui serta dapat ditentukan peningkatan kinerjanya.

Banyak metode yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi antara lain: *Malcom Baldrige National Quality Award* (MBNQA), *Balanced Scorecard* (BSC), *Six Sigma* dan lain-lain. Diantara metode-metode tersebut, BSC merupakan salah satu metode yang sangat populer digunakan dalam dekade terakhir.

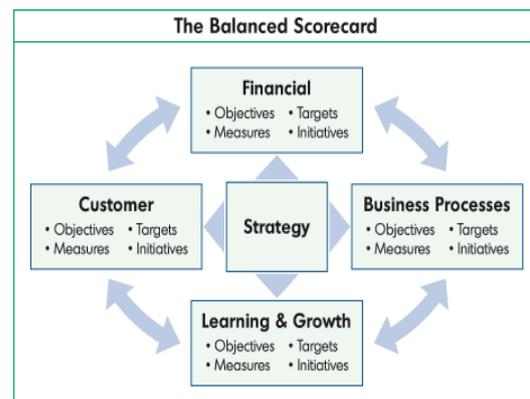
Balance Scorecard menggunakan empat perspektif BSC yang menyatakan sebagai Bidang Kinerja Kritis (*Critical Performance Area*), yaitu: pengguna, keuangan, proses internal dan pembelajaran (Kementrian PU, 2013).

Penjelasannya sebagai berikut :

1. Pengguna: bagaimana kepuasan thd pengguna/penerima manfaat polder
2. Keuangan: bagaimana keuangan/dana agar polder bisa berlangsung keberlanjutannya
3. Proses Internal: bagaimana fungsi polder memenuhi harapan masyarakat
4. Pembelajaran: bagaimana inovasi pelayanan polder ke depan

### Metode *Balance Scorecard*

*Balance Scorecard* adalah alat manajemen berupa laporan terstruktur yang digunakan untuk melacak pelaksanaan suatu kegiatan. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini paling banyak dikenal dan digunakan. Konsep BSC pertama kali disampaikan oleh Kaplan dan Norton 1992. Kaplan (1992) mengemukakan bahwa *Balance Scorecard* dapat menjawab empat pertanyaan pokok yaitu 1). Bagaimana kepuasan pengguna; 2) bagaimana pengaturan dana 3) apa yang harus dan akan kita laksanakan dan 4) apa yang akan dikembangkan. Sebagaimana dalam Gambar 1 dibawah ini.



Sumber: Kaplan 1992

Gambar 1. Diagram *balance scorecard*

Penggunaan *balance scorecard* dalam pengelolaan sumber daya air telah banyak dilakukan antara lain IWMI (*International Water Management Institute*) mengembangkan teori ini untuk mengukur kinerja pengelolaan air. Berdasarkan kajian diatas metode *Balance Scorecard* dicoba diterapkan untuk mengukur kinerja pengelolaan polder.

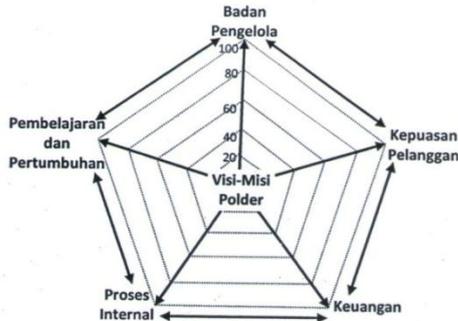
### Penilaian kinerja polder dengan *balanced scorecard*

Penilaian kinerja menggunakan 5 (lima) Bidang Kinerja Kritis (BKK). Masing-masing BKK terdiri

dari beberapa indikator penilaian, untuk pencapaian sempurna di total nilai indikator dalam satu BKK adalah 100.

Bidang kinerja kritis terdiri dari:

1. Bidang kinerja kritis badan pengelola (Tabel 1)
2. Bidang kinerja kritis pengguna (Tabel 2)
3. Bidang kinerja kritis dana (Tabel 3)
4. Bidang kinerja kritis proses internal (Tabel 4)
5. Bidang kinerja kritis pembelajaran dan pengembangan (Tabel 5)



**Gambar 2. Diagram penilaian kinerja polder dengan *balance scorecard***

Teknik analisa data dilakukan dengan metode kuantitatif dengan mengolah data kuisioner dengan memberikan skala penilaian 0-100 untuk setiap indikator yang dinilai. Untuk membandingkan hasil ketiga polder yang akan dinilai dianggap masing-masing kinerja mempunyai bobot yang sama sehingga Nilai tertinggi mempunyai kinerja yang paling baik. Setelah semua indikator dinilai, lalu dilakukan perhitungan bobot dari masing-masing bidang kinerja kritis. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*), yaitu dengan menggunakan kuisioner yang diberikan kepada narasumber. Hasil pembobotan kemudian dijumlahkan untuk menentukan skor hasil kinerja masing-masing polder.

**Wilayah Kajian**

Kajian Kinerja Polder dengan Metode *Balance Scorecard* dilakukan pada empat polder yang ada di Kota Semarang, yaitu Polder Kali Semarang, Polder Banger, Polder Tanah Mas dan Polder Tawang sebagaimana disajikan dalam Gambar 3 di bawah.

**Tabel 1. Range metode *balance scorecard* bidang kinerja kritis badan pengelola**

Indikator yang dinilai	Kondisi saat penilaian	Nilai
Status pengelola polder	- Tidak ada pengelola	0
	- Sudah ada pengelola dan TUPOKSI belum baik dan belum berbadan hukum.	5
	- Sudah ada pengelola dan TUPOKSI sudah baik tapi belum berbadan hukum	7
	- Sudah ada pengelola dan TUPOKSI yang baik dan sudah berbadan hukum.	10
Pemahaman Visi dan Misi	- Pemahaman kurang	5
	- Pemahaman tugas baik tapi pemahaman visi dan misi kurang	10
	- Pemahaman tugas dan visi misi sudah baik	15
Kemandirian badan pengelola	- Terdiri dari unsur pemerintah, cendekiawan dan masyarakat	5
	- Terdiri dari cendekiawan dan masyarakat	10
	- Terdiri dari masyarakat saja	15
Pengelolaan polder	- Jarang melakukan rapat koordinasi dan OP dilakukan sendiri oleh pelaksana	10
	- Sering dilakukan rapat koordinasi dan OP dilakukan oleh yang berkepentingan	20
Keterwakilan masyarakat	- Pengelola melibatkan masyarakat namun belum semua kepentingan terwakili dan keputusan tidak berdampak langsung	5
	- Pengelola sudah menampung pendapat masyarakat namun belum mencerminkan demokrasi sepenuhnya	10
	- Pengelola sudah melibatkan masyarakat dan sudah mencerminkan demokrasi sepenuhnya	20
Implementasi hasil rapat dengan masyarakat	- Keputusan yang dibuat dalam rapat dengan masyarakat tidak berdampak langsung	10
	- Keputusan yang dibuat dalam rapat dengan masyarakat berdampak langsung	20

Sumber: Kementerian PU. (2013)

**Tabel 2. Range metode *balance scorecard* bidang kinerja kritis kepuasan pelanggan**

Indikator yang dinilai	Kondisi saat penilaian	Nilai
Pemanfaatan lahan	- Lahan didominasi oleh lingkungan bisnis	5
	- Lahan didominasi oleh pemukiman biasa	10
Tingkat kesadaran masyarakat oleh keberadaan polder	- Tingkat kesadaran kurang	3
	- Tingkat kesadaran cukup	5
	- Tingkat kesadaran baik	10
Pengaruh genangan	- Pengaruh banjir dan rob bagi kehidupan kurang	5
	- Pengaruh banjir dan rob bagi kehidupan sedang	10
	- Pengaruh banjir dan rob bagi kehidupan besar	15
Jaminan kemampuan polder	- Tidak ada jaminan mampu melindungi masyarakat	5
	- Mampu melindungi masyarakat sedang	10
	- Mampu melindungi masyarakat baik	15
Kualitas air	- Tidak dipantau	5
	- Ada pemantauan tapi tidak ada upaya perbaikan	10
	- Dipantau dan ada upaya perbaikan	15
<i>Feed back</i> pelanggan	- Belum pernah dilakukan <i>survey</i> kepuasan pelanggan	0
	- Pernah dilakukan <i>survey</i> tapi jarang	10
	- Secara periodik dilakukan <i>survey</i>	15
Keluhan dan penanganan pelanggan	- Tidak ada sarana pengaduan masyarakat	0
	- Keluhan pelanggan diterima dengan baik tapi tidak segera ditindak lanjuti	5
	- Keluhan pelanggan diterima dengan baik dan segera ditindak lanjuti	10

Sumber: Kementerian PU. (2013)

**Tabel 3. Range metode *balance scorecard* bidang kinerja kritis keuangan**

Indikator yang dinilai	Kondisi saat penilaian	Nilai
Sumber dana pembangunan	- Dari pemerintah/bantuan LN	5
	- Dari pemerintah dan masyarakat	10
	- Murni dari masyarakat	15
	- Dari masyarakat dan investor	20
Dana OP	- Dari pemerintah/bantuan LN	5
	- Dari pemerintah dan masyarakat	10
	- Murni dari masyarakat	15
	- Dari masyarakat dan investor	20
Penentuan tarif penarikan dana dari masyarakat	- Sama	5
	- Berdasar luasan tanah	15
	- Berdasarkan kemauan dan kemampuan membayar	20
Kecukupan dana	- Dana kurang	5
	- Dana cukup	15
	- Dana melebihi	25
Perencanaan dan transparansi keuangan	- Belum dilakukan perencanaan pemasukan keuangan dan belum ada laporan keuangan	5
	- Sudah dilakukan perencanaan pemasukan keuangan dan belum ada laporan keuangan	10
	- Sudah dilakukan perencanaan pemasukan keuangan dan ada ada laporan keuangan	15

Sumber: Kementerian PU, 2013

### Hasil Penilaian

Setelah dilakukan identifikasi dengan bobot yang sama dengan menggunakan metode AHP, lalu dilakukan identifikasi dengan pembobotan yang berbeda. Hal ini ditujukan agar dapat diketahui keseimbangan sistem polder dilihat dari sisi

finansial dan nonfinansial. Dalam hal ini bidang kinerja non finansial meliputi kepuasan pelanggan, badan pengelola, proses internal dan pembelajaran dan pengembangan. Dengan pembobotan tersebut, maka *scoring* penilaian kinerja polder dengan menggunakan *Balance Scorecard* pada Tabel 6 dan Gambar 3

**Tabel 4. Range metode *balance scorecard* bidang kinerja kritis proses internal**

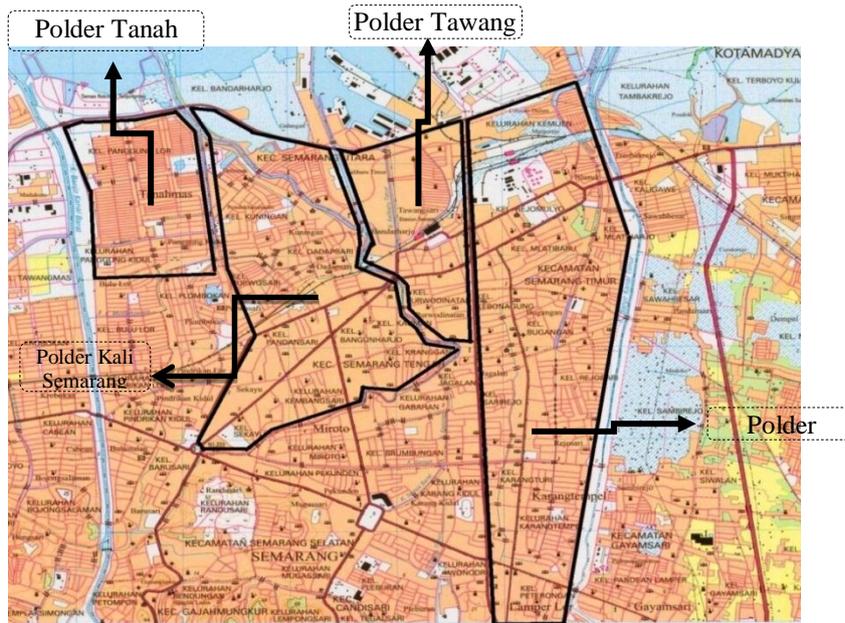
Indikator yang dinilai	Kondisi saat penilaian	Nilai
Pemahaman staf terhadap pengelolaan dan visi dan misi	- Pemahaman kurang	5
	- Pemahaman cukup baik	10
Strategi pengendalian muka air	- Belum ada SOP	5
	- Sudah ada SOP tanpa pompa cadangan	10
	- Sudah ada SOP dengan pompa cadangan	15
Perencanaan OP polder	- Tidak ada perencanaan OP polder	5
	- Memiliki rencana OP yang difokuskan pada perencanaan untuk memperoleh anggaran yang akan dilakukan	10
	- Memiliki rencana OP jangka panjang dan pendek	15
Petugas OP polder	- Petugas kurang mampu melaksanakan OP dengan baik	5
	- Petugas mampu melaksanakan OP dengan baik	15
Sistem Administrasi	- Baik	5
	- Baik tapi pengarsipan belum baik dan tertib	10
	- Baik dan sudah ada pengarsipan dengan baik	15
Bangunan sarana dan prasarana	- Bangunan belum sesuai dengan kaidah teknik	0
	- Bangunan sudah sesuai dengan kaidah teknik tanpa memperhatikan kenyamanan	5
	- Bangunan sudah sesuai dengan kaidah teknik dan memperhatikan kenyamanan	10
	- Bangunan sudah sesuai dengan kaidah teknik dan memperhatikan kenyamanan serta sebagai tambahan <i>income</i> dari pengelolaan	15
Pengumpulan dan pemanfaatan data	- Tidak ada data yang dikumpulkan	0
	- Data dikumpulkan secara sporadis	5
	- Data dikumpulkan secara rutin	8
	- Data dikumpulkan dan disimpan dengan baik	10

Sumber: Kementerian PU, 2013

**Tabel 5. Range Metode *Balance Scorecard* bidang kinerja kritis pembelajaran dan Pengembangan**

Indikator yang dinilai	Kondisi saat penilaian	Nilai
Perencanaan pelatihan	- Tidak ada rencana pelatihan pada staff pelaksana	0
	- Ada rencana pelatihan pada staf pelaksana sesuai kebutuhan	10
	- Ada rencana pelatihan pada staf pelaksana secara jangka pendek dan jangka panjang	15
Penilaian kinerja staff	- Tidak ada sistem penilaian	0
	- Ada sistem penilaian tapi tidak terkait dengan jenjang karier	5
	- Ada sistem penilaian dan terkait dengan jenjang karier	10
	- Ada sistem penilaian dan terkait dengan penjenjangan karier	15
Penilaian suasana kerja	- Belum ada sarana penyampaian keluhan	0
	- Ada sarana penyampaian keluhan namun tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh	10
	- Ada sarana penyampaian keluhan dan segera ditindak lanjuti	15
Pengembangan sistem informasi	- Tidak adap pengembangan sistem informasi	0
	- Pengembangan sistem informasi belum terintegrasi dengan pengelolaan polder	10
	- Ada rencana jangka pendek dan panjang yang sesuai dengan sasaran rencana pengembangan pengelolaan	15
Pengembangan peralatan	- Tidak ada rencana pengembangan peralatan	0
	- Ada pengembangan peralatan namun masih bersifat insidentiiil	10
	- Ada rencana pengembangan peralatan secara jangka pendek dan panjang	20
Pengembangan sistem pengeloaalan	- Tidak ada rencana pengembangan sistem pengelolaan	0
	- Ada pengembangan sistem pengelolaan namun masih bersifat insidentiiil	10
	- Ada rencana pengembangan sistem pengelolaan secara jangka pendek dan panjang	20

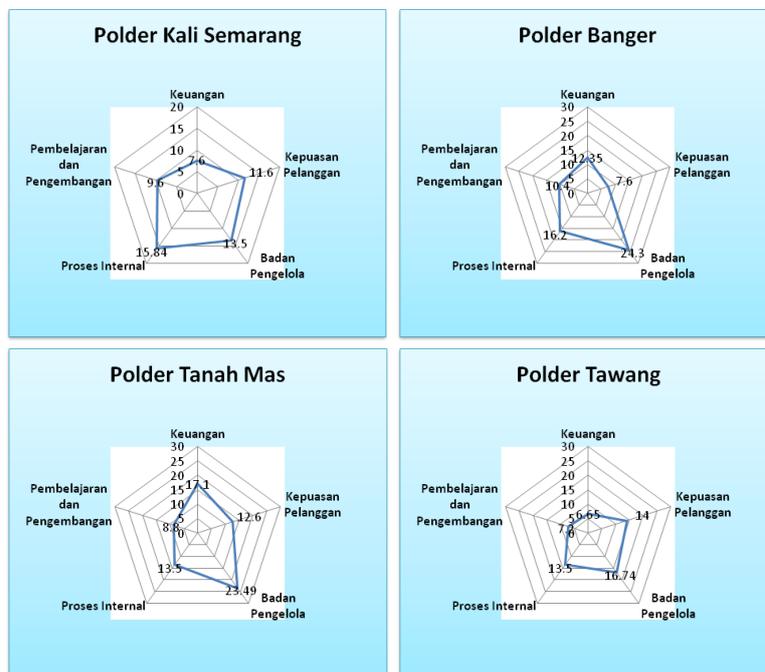
Sumber : Kementerian PU, 2013



Gambar 3. Peta lokasi polder di Semarang

Tabel 6. Hasil penilaian kinerja dengan *balanced scorecard*

Polder	Kali Semarang		Banger		Tanah Mas		Tawang	
	Nilai	Nilai bobot	Nilai	Nilai bobot	Nilai	Nilai bobot	Nilai	Nilai bobot
Keuangan (19%)	40	7,60	65	12,35	90	17,10	35	6,65
Kepuasan pelanggan (20%)	58	11,66	38	7,60	63	12,60	70	14,00
Badan pengelola (27%)	50	13,50	90	24,30	87	23,49	62	16,74
Proses internal (18%)	88	15,84	90	16,20	75	13,50	75	13,50
Pembelajaran dan pengembangan (16%)	60	9,60	65	10,40	55	8,80	45	7,20
<b>Jumlah</b>		<b>58,70</b>		<b>67,21</b>		<b>73,81</b>		<b>58,65</b>



Gambar 4. Diagram hasil penilaian kinerja polder Kali Semarang, Banger, Tanah Mas dan polder Tawang

## Analisa dan Pembahasan

Polder Kali Semarang ini memiliki nilai keuangan 40/100. Angka tersebut dikatakan cukup rendah, dan dinilai belum bisa dikatakan mandiri dalam hal pengelolaannya. Keberadaan Badan Pengelola Pada Polder Kali Semarang ini memiliki nilai 50/100, dikarenakan badan pengelolaannya yang masih kurang terstruktur dan keterlibatan masyarakat yang kurang terwakilkan.

Pada Polder Banger kelemahan yang utama adalah kepuasan pelanggan dengan nilai 38/100. Hal ini jelas terjadi, karena belum sempurnanya Polder ini beroperasi. Namun untuk kriteria lain cukup baik karena dipersiapkan cukup awal.

Polder Tanah Mas memiliki nilai tertinggi dari pembobotan polder-polder lainnya, karena dikelola oleh masyarakat. Proses yang adil dan transparan ini menjadikan P5L suatu paguyuban yang cukup mandiri dari finansialnya. Keunggulan pada badan pengelola dimana anggotanya sendiri berasal dari masyarakat setempat yang memiliki nasib yang sama membuat tergugah untuk berusaha sendiri memberantas genangan air yang setiap tahun mengganggu. Namun untuk aspek pembelajaran dan pengembangan perlu lebih ditingkatkan karena nilainya 55/100.

Polder Tawang ada 2 indikator yang perlu dipacu. Yaitu keuangan nilai 35/100 dan pembelajaran dan pengembangan perlu lebih ditingkatkan karena nilainya 45/100. Perlu adanya rencana partisipasi masyarakat dalam hal keuangan dan pengembangan sistem pengelolaannya di masa mendatang.

Secara Umum Pengelolaan Polder Tanah Mas paling ideal dengan nilai (73,81/100) kemudian Polder Banger (67,21/100), Polder Kali Semarang (58,70/100) dan Polder Tawang (58,65/100).

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Sistem Polder Sebagai Model Pengembangan Drainase Kota Semarang Bagian Bawah Dengan *Balanced Scorecard* menghasilkan penilaian kinerja: Polder Tanah Mas dengan nilai (73,81/100), kemudian

Polder Banger (67,21/100), Polder Kali Semarang (58,70/100) dan Polder Tawang (58,65/100).

2. Polder-polder tersebut memiliki efektifitas yang tinggi dalam penanggulangan banjir dan genangan di kota Semarang.
3. Kinerja dari Sistem Polder tidak dapat dilepaskan dari keberadaan badan pengelola yang baik, mandiri dan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya dalam mengelola sistem polder.
4. Model pengelolaan yang berbasis masyarakat dan dukungan dari instansi pemerintah merupakan model yang paling sesuai dalam pengelolaan polder di Kota Semarang.

## Saran

Dari hasil penelitian ini diberikan saran sebagai berikut:

1. Kinerja dari sistem polder tidak dapat dilepaskan dari keberadaan badan pengelola yang baik sehingga keberadaan badan pengelola perlu dipersiapkan dalam pengembangan sistem polder.
2. Perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sistem polder.
3. Polder-polder yang sudah ada di Kota Semarang perlu ditingkatkan kinerjanya dengan meningkatkan kinerja indikator yang masih kurang berdasarkan penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Bappeda Kota Semarang, 2013. *Studi Pengendalian Banjir dan Rob Kota Semarang*
- Kementerian PU, 2013. *Penilaian Kinerja Polder dengan Balanced Scorecard*, Draft, Jakarta.
- Robert S., Kaplan and David P., Norton, 1992. *The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance*, Harvard Business Review.
- Witteveen +Bos, 2009. *Detailed Design Report, Development Pilot Polder Semarang and Guideline Polder Development*.